



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.7-739 TAHUN 2026

TENTANG

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL TAHUN 2025 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-234 Tahun 2025 tentang Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

Memperhatikan : Kesepakatan Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil EPPD Tahun 2025 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Secara Nasional tanggal 9 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2025 BERDASARKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara Nasional Tahun 2025 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Nama pemerintah provinsi berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 34 (tiga puluh empat) provinsi;
 - b. Nama pemerintah kabupaten berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 415 (empat ratus lima belas) kabupaten; dan
 - c. Nama pemerintah kota, berdasarkan Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap 93 (sembilan puluh tiga) kota.
- KEEMPAT : Skor dan Status Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada 5 (lima) pemerintah provinsi, 15 (lima belas) pemerintah kabupaten dan 10 (sepuluh) pemerintah kota dengan Skor dan Status Kinerja yang berprestasi tertinggi secara nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diusulkan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penerima penghargaan Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada kepala daerah dan Parasamya Purnakarya Nugraha kepada Institusi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini dikecualikan bagi kepala daerah yang tersangkut masalah hukum.

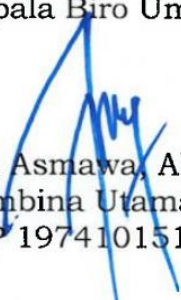
KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2026
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


Dr. Asmawa AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Kepala Badan Pusat Statistik; dan
11. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.2.7-739 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH SECARA
NASIONAL TAHUN 2025 BERDASARKAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

A. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL

1. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
34 (TIGA PULUH EMPAT) PROVINSI

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
1.	Provinsi DKI Jakarta	3,6762	Tinggi
2.	Provinsi Jawa Barat	3,6624	Tinggi
3.	Provinsi DI Yogyakarta	3,4875	Tinggi
4.	Provinsi Jawa Timur	3,4695	Tinggi
5.	Provinsi Kalimantan Selatan	3,4423	Tinggi
6.	Provinsi Jawa Tengah	3,4404	Tinggi
7.	Provinsi Banten	3,3380	Sedang
8.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,3288	Sedang
9.	Provinsi Bali	3,2893	Sedang
10.	Provinsi Kalimantan Barat	3,2325	Sedang
11.	Provinsi Kalimantan Timur	3,1626	Sedang
12.	Provinsi Kalimantan Tengah	3,1288	Sedang
13.	Provinsi Jambi	3,0859	Sedang
14.	Provinsi Bengkulu	3,0224	Sedang
15.	Provinsi Sumatera Barat	2,9790	Sedang
16.	Provinsi Riau	2,9572	Sedang
17.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,9567	Sedang
18.	Provinsi Kepulauan Riau	2,9538	Sedang
19.	Provinsi Sulawesi Selatan	2,9283	Sedang
20.	Provinsi Sulawesi Tengah	2,9130	Sedang
21.	Provinsi Lampung	2,9040	Sedang
22.	Provinsi Sumatera Selatan	2,8608	Sedang
23.	Provinsi Sulawesi Barat	2,8194	Sedang
24.	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,7470	Sedang
25.	Provinsi Gorontalo	2,7358	Sedang
26.	Provinsi Aceh	2,7047	Sedang
27.	Provinsi Sulawesi Utara	2,6721	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
28.	Provinsi Kalimantan Utara	2,4901	Rendah
29.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,3176	Rendah
30.	Provinsi Sumatera Utara	2,2887	Rendah
31.	Provinsi Maluku Utara	2,2455	Rendah
32.	Provinsi Maluku	2,1907	Rendah
33.	Provinsi Papua	2,1311	Rendah
34.	Provinsi Papua Barat	1,9685	Rendah

2. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
415 (EMPAT RATUS LIMA BELAS) KABUPATEN

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
1.	Kabupaten Banyuwangi	3,8202	Tinggi
2.	Kabupaten Sidoarjo	3,6389	Tinggi
3.	Kabupaten Bandung	3,6154	Tinggi
4.	Kabupaten Jombang	3,5962	Tinggi
5.	Kabupaten Indramayu	3,5699	Tinggi
6.	Kabupaten Gresik	3,5560	Tinggi
7.	Kabupaten Gianyar	3,5537	Tinggi
8.	Kabupaten Bojonegoro	3,5533	Tinggi
9.	Kabupaten Nganjuk	3,5409	Tinggi
10.	Kabupaten Ngawi	3,5322	Tinggi
11.	Kabupaten Banyumas	3,5289	Tinggi
12.	Kabupaten Malang	3,5124	Tinggi
13.	Kabupaten Bangli	3,5122	Tinggi
14.	Kabupaten Purbalingga	3,5094	Tinggi
15.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,4953	Tinggi
16.	Kabupaten Grobogan	3,4920	Tinggi
17.	Kabupaten Tapin	3,4895	Tinggi
18.	Kabupaten Klaten	3,4836	Tinggi
19.	Kabupaten Bone	3,4691	Tinggi
20.	Kabupaten Kediri	3,4629	Tinggi
21.	Kabupaten Jepara	3,4568	Tinggi
22.	Kabupaten Balangan	3,4495	Tinggi
23.	Kabupaten Magelang	3,4325	Tinggi
24.	Kabupaten Sragen	3,4289	Tinggi
25.	Kabupaten Konawe	3,4218	Tinggi
26.	Kabupaten Banjarnegara	3,4169	Tinggi
27.	Kabupaten Wonogiri	3,4158	Tinggi
28.	Kabupaten Madiun	3,4110	Tinggi
29.	Kabupaten Tangerang	3,4034	Sedang
30.	Kabupaten Bekasi	3,4021	Sedang
31.	Kabupaten Bantul	3,3974	Sedang
32.	Kabupaten Magetan	3,3887	Sedang
33.	Kabupaten Ciamis	3,3812	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
34.	Kabupaten Barito Kuala	3,3737	Sedang
35.	Kabupaten Boyolali	3,3730	Sedang
36.	Kabupaten Lamongan	3,3693	Sedang
37.	Kabupaten Lombok Utara	3,3556	Sedang
38.	Kabupaten Pacitan	3,3487	Sedang
39.	Kabupaten Bintan	3,3420	Sedang
40.	Kabupaten Kudus	3,3402	Sedang
41.	Kabupaten Barito Selatan	3,3392	Sedang
42.	Kabupaten Semarang	3,3260	Sedang
43.	Kabupaten Bangka Barat	3,3214	Sedang
44.	Kabupaten Karanganyar	3,3138	Sedang
45.	Kabupaten Batang	3,3084	Sedang
46.	Kabupaten Bogor	3,3066	Sedang
47.	Kabupaten Kuningan	3,2997	Sedang
48.	Kabupaten Sumedang	3,2942	Sedang
49.	Kabupaten Karawang	3,2931	Sedang
50.	Kabupaten Tulungagung	3,2926	Sedang
51.	Kabupaten Badung	3,2863	Sedang
52.	Kabupaten Bangka	3,2857	Sedang
53.	Kabupaten Cianjur	3,2781	Sedang
54.	Kabupaten Blitar	3,2739	Sedang
55.	Kabupaten Kulon Progo	3,2725	Sedang
56.	Kabupaten Blora	3,2725	Sedang
57.	Kabupaten Sumbawa Barat	3,2665	Sedang
58.	Kabupaten Wonosobo	3,2605	Sedang
59.	Kabupaten Sumbawa	3,2492	Sedang
60.	Kabupaten Serang	3,2484	Sedang
61.	Kabupaten Kendal	3,2479	Sedang
62.	Kabupaten Banjar	3,2473	Sedang
63.	Kabupaten Mojokerto	3,2385	Sedang
64.	Kabupaten Maros	3,2362	Sedang
65.	Kabupaten Sigi	3,2149	Sedang
66.	Kabupaten Berau	3,2128	Sedang
67.	Kabupaten Buleleng	3,2085	Sedang
68.	Kabupaten Pinrang	3,2040	Sedang
69.	Kabupaten Tasikmalaya	3,1976	Sedang
70.	Kabupaten Agam	3,1951	Sedang
71.	Kabupaten Demak	3,1840	Sedang
72.	Kabupaten Pasaman	3,1774	Sedang
73.	Kabupaten Pekalongan	3,1755	Sedang
74.	Kabupaten Sukabumi	3,1728	Sedang
75.	Kabupaten Trenggalek	3,1718	Sedang
76.	Kabupaten Pasuruan	3,1595	Sedang
77.	Kabupaten Batu Bara	3,1579	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
78.	Kabupaten Dharmasraya	3,1429	Sedang
79.	Kabupaten Bulukumba	3,1291	Sedang
80.	Kabupaten Mamuju Tengah	3,1257	Sedang
81.	Kabupaten Gunungkidul	3,1193	Sedang
82.	Kabupaten Sukoharjo	3,1169	Sedang
83.	Kabupaten Kotawaringin Barat	3,1097	Sedang
84.	Kabupaten Cilacap	3,1094	Sedang
85.	Kabupaten Kutai Kartanegara	3,1072	Sedang
86.	Kabupaten Tanah Laut	3,1013	Sedang
87.	Kabupaten Tabanan	3,0905	Sedang
88.	Kabupaten Tegal	3,0773	Sedang
89.	Kabupaten Bantaeng	3,0643	Sedang
90.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	3,0617	Sedang
91.	Kabupaten Pemalang	3,0606	Sedang
92.	Kabupaten Majalengka	3,0554	Sedang
93.	Kabupaten Ponorogo	3,0547	Sedang
94.	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	3,0542	Sedang
95.	Kabupaten Bandung Barat	3,0533	Sedang
96.	Kabupaten Sinjai	3,0467	Sedang
97.	Kabupaten Sanggau	3,0451	Sedang
98.	Kabupaten Bungo	3,0449	Sedang
99.	Kabupaten Lumajang	3,0380	Sedang
100.	Kabupaten Brebes	3,0346	Sedang
101.	Kabupaten Probolinggo	3,0310	Sedang
102.	Kabupaten Bondowoso	3,0291	Sedang
103.	Kabupaten Lamandau	3,0211	Sedang
104.	Kabupaten Sijunjung	3,0135	Sedang
105.	Kabupaten Bone Bolango	3,0053	Sedang
106.	Kabupaten Purwakarta	3,0044	Sedang
107.	Kabupaten Tanah Bumbu	3,0006	Sedang
108.	Kabupaten Kebumen	2,9966	Sedang
109.	Kabupaten Rembang	2,9917	Sedang
110.	Kabupaten Solok Selatan	2,9879	Sedang
111.	Kabupaten Banyuasin	2,9840	Sedang
112.	Kabupaten Konawe Utara	2,9832	Sedang
113.	Kabupaten Dompu	2,9822	Sedang
114.	Kabupaten Kotabaru	2,9812	Sedang
115.	Kabupaten Tabalong	2,9791	Sedang
116.	Kabupaten Bangka Tengah	2,9729	Sedang
117.	Kabupaten Konawe Kepulauan	2,9706	Sedang
118.	Kabupaten Lingga	2,9675	Sedang
119.	Kabupaten Belitung Timur	2,9670	Sedang
120.	Kabupaten Subang	2,9626	Sedang
121.	Kabupaten Purworejo	2,9619	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
122.	Kabupaten Pati	2,9574	Sedang
123.	Kabupaten Pamekasan	2,9553	Sedang
124.	Kabupaten Klungkung	2,9427	Sedang
125.	Kabupaten Poso	2,9377	Sedang
126.	Kabupaten Asahan	2,9312	Sedang
127.	Kabupaten Pringsewu	2,9267	Sedang
128.	Kabupaten Bangkalan	2,9242	Sedang
129.	Kabupaten Halmahera Selatan	2,9208	Sedang
130.	Kabupaten Jember	2,9188	Sedang
131.	Kabupaten Lebak	2,9187	Sedang
132.	Kabupaten Muara Enim	2,9178	Sedang
133.	Kabupaten Garut	2,9134	Sedang
134.	Kabupaten Toraja Utara	2,9113	Sedang
135.	Kabupaten Kapuas	2,9038	Sedang
136.	Kabupaten Mamasa	2,8968	Sedang
137.	Kabupaten Morowali Utara	2,8833	Sedang
138.	Kabupaten Kolaka	2,8776	Sedang
139.	Kabupaten Penajam Paser Utara	2,8756	Sedang
140.	Kabupaten Pohuwato	2,8721	Sedang
141.	Kabupaten Lombok Barat	2,8615	Sedang
142.	Kabupaten Barru	2,8597	Sedang
143.	Kabupaten Lampung Barat	2,8593	Sedang
144.	Kabupaten Lampung Tengah	2,8442	Sedang
145.	Kabupaten Landak	2,8418	Sedang
146.	Kabupaten Kapuas Hulu	2,8391	Sedang
147.	Kabupaten Tapanuli Utara	2,8362	Sedang
148.	Kabupaten Nunukan	2,8313	Sedang
149.	Kabupaten Cirebon	2,8249	Sedang
150.	Kabupaten Ketapang	2,8239	Sedang
151.	Kabupaten Tuban	2,8150	Sedang
152.	Kabupaten Mamuju	2,8137	Sedang
153.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2,8099	Sedang
154.	Kabupaten Musi Banyuasin	2,8093	Sedang
155.	Kabupaten Luwu Timur	2,8072	Sedang
156.	Kabupaten Temanggung	2,8050	Sedang
157.	Kabupaten Langkat	2,8036	Sedang
158.	Kabupaten Humbang Hasundutan	2,8004	Sedang
159.	Kabupaten Bangka Selatan	2,7978	Sedang
160.	Kabupaten Wajo	2,7964	Sedang
161.	Kabupaten Belitung	2,7919	Sedang
162.	Kabupaten Merangin	2,7863	Sedang
163.	Kabupaten Tanggamus	2,7860	Sedang
164.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,7847	Sedang
165.	Kabupaten Tojo Una-Una	2,7844	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
166.	Kabupaten Polewali Mandar	2,7830	Sedang
167.	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	2,7801	Sedang
168.	Kabupaten Kampar	2,7791	Sedang
169.	Kabupaten Sleman	2,7779	Sedang
170.	Kabupaten Kepulauan Selayar	2,7760	Sedang
171.	Kabupaten Sukamara	2,7739	Sedang
172.	Kabupaten Minahasa Utara	2,7662	Sedang
173.	Kabupaten Parigi Moutong	2,7627	Sedang
174.	Kabupaten Bima	2,7627	Sedang
175.	Kabupaten Gowa	2,7616	Sedang
176.	Kabupaten Sambas	2,7615	Sedang
177.	Kabupaten Sidenreng Rappang	2,7614	Sedang
178.	Kabupaten Bulungan	2,7581	Sedang
179.	Kabupaten Musi Rawas	2,7523	Sedang
180.	Kabupaten Natuna	2,7491	Sedang
181.	Kabupaten Bengkulu Selatan	2,7437	Sedang
182.	Kabupaten Murung Raya	2,7430	Sedang
183.	Kabupaten Ogan Ilir	2,7414	Sedang
184.	Kabupaten Lombok Tengah	2,7400	Sedang
185.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	2,7394	Sedang
186.	Kabupaten Bombana	2,7387	Sedang
187.	Kabupaten Jembrana	2,7369	Sedang
188.	Kabupaten Gunung Mas	2,7365	Sedang
189.	Kabupaten Enrekang	2,7358	Sedang
190.	Kabupaten Bengkayang	2,7264	Sedang
191.	Kabupaten Aceh Jaya	2,7249	Sedang
192.	Kabupaten Batanghari	2,7239	Sedang
193.	Kabupaten Bengkalis	2,7234	Sedang
194.	Kepulauan Anambas	2,7230	Sedang
195.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2,7213	Sedang
196.	Kabupaten Barito Utara	2,7196	Sedang
197.	Kabupaten Nias	2,7190	Sedang
198.	Kabupaten Sumenep	2,7190	Sedang
199.	Kabupaten Kolaka Timur	2,7189	Sedang
200.	Kabupaten Luwu Utara	2,7180	Sedang
201.	Kabupaten Padang Pariaman	2,7165	Sedang
202.	Kabupaten Bolaang Mongondow	2,7164	Sedang
203.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	2,7149	Sedang
204.	Kabupaten Solok	2,7130	Sedang
205.	Kabupaten Sekadau	2,7090	Sedang
206.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2,7080	Sedang
207.	Kabupaten Karo	2,7034	Sedang
208.	Kabupaten Paser	2,7023	Sedang
209.	Kabupaten Mukomuko	2,6992	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
210.	Kabupaten Katingan	2,6976	Sedang
211.	Kabupaten Situbondo	2,6973	Sedang
212.	Kabupaten Kepahiang	2,6961	Sedang
213.	Kabupaten Bengkulu Tengah	2,6949	Sedang
214.	Kabupaten Pangandaran	2,6905	Sedang
215.	Kabupaten Kolaka Utara	2,6898	Sedang
216.	Kabupaten Tanah Datar	2,6852	Sedang
217.	Kabupaten Pandeglang	2,6798	Sedang
218.	Kabupaten Aceh Besar	2,6788	Sedang
219.	Kabupaten Tapanuli Selatan	2,6783	Sedang
220.	Kabupaten Mahakam Ulu	2,6780	Sedang
221.	Kabupaten Luwu	2,6746	Sedang
222.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2,6735	Sedang
223.	Kabupaten Pakpak Bharat	2,6678	Sedang
224.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	2,6602	Sedang
225.	Kabupaten Siak	2,6591	Sedang
226.	Kabupaten Barito Timur	2,6579	Sedang
227.	Kabupaten Toli-Toli	2,6552	Sedang
228.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,6523	Sedang
229.	Kabupaten Rejang Lebong	2,6513	Sedang
230.	Kabupaten Seruyan	2,6497	Sedang
231.	Kabupaten Takalar	2,6495	Sedang
232.	Kabupaten Tebo	2,6433	Sedang
233.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2,6412	Sedang
234.	Kabupaten Majene	2,6367	Sedang
235.	Kabupaten Karimun	2,6352	Sedang
236.	Kabupaten Pulang Pisau	2,6349	Sedang
237.	Kabupaten Samosir	2,6334	Sedang
238.	Kabupaten Mimika	2,6310	Sedang
239.	Kabupaten Sarolangun	2,6290	Sedang
240.	Kabupaten Rokan Hulu	2,6236	Sedang
241.	Kabupaten Muaro Jambi	2,6202	Sedang
242.	Kabupaten Boalemo	2,6189	Sedang
243.	Kabupaten Serdang Bedagai	2,6136	Sedang
244.	Kabupaten Deli Serdang	2,6133	Sedang
245.	Kabupaten Tana Tidung	2,6126	Sedang
246.	Kabupaten Bengkulu Utara	2,6093	Rendah
247.	Kabupaten Halmahera Tengah	2,6091	Rendah
248.	Kabupaten Lampung Selatan	2,6037	Rendah
249.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	2,6031	Rendah
250.	Kabupaten Sumba Barat	2,6020	Rendah
251.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2,5941	Rendah
252.	Kabupaten Buru Selatan	2,5940	Rendah
253.	Kabupaten Morowali	2,5864	Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
254.	Kabupaten Pesisir Selatan	2,5855	Rendah
255.	Kabupaten Sampang	2,5833	Rendah
256.	Kabupaten Lombok Timur	2,5814	Rendah
257.	Kabupaten Tolikara	2,5813	Rendah
258.	Kabupaten Empat Lawang	2,5812	Rendah
259.	Kabupaten Pesisir Barat	2,5802	Rendah
260.	Kabupaten Kutai Barat	2,5789	Rendah
261.	Kabupaten Dairi	2,5715	Rendah
262.	Kabupaten Simalungun	2,5704	Rendah
263.	Kabupaten Gorontalo Utara	2,5696	Rendah
264.	Kabupaten Toba	2,5684	Rendah
265.	Kabupaten Mempawah	2,5675	Rendah
266.	Kabupaten Kubu Raya	2,5654	Rendah
267.	Kabupaten Soppeng	2,5632	Rendah
268.	Kabupaten Mesuji	2,5625	Rendah
269.	Kabupaten Banggai Kepulauan	2,5523	Rendah
270.	Kabupaten Kutai Timur	2,5517	Rendah
271.	Kabupaten Malaka	2,5516	Rendah
272.	Kabupaten Halmahera Timur	2,5495	Rendah
273.	Kabupaten Banggai	2,5367	Rendah
274.	Kabupaten Gorontalo	2,5350	Rendah
275.	Kabupaten Way Kanan	2,5319	Rendah
276.	Kabupaten Maluku Tengah	2,5313	Rendah
277.	Kabupaten Pidie Jaya	2,5207	Rendah
278.	Kabupaten Buton Utara	2,5193	Rendah
279.	Kabupaten Karangasem	2,5182	Rendah
280.	Kabupaten Pasaman Barat	2,5180	Rendah
281.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	2,5146	Rendah
282.	Kabupaten Kayong Utara	2,5122	Rendah
283.	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2,5119	Rendah
284.	Kabupaten Minahasa	2,5038	Rendah
285.	Kabupaten Sintang	2,5034	Rendah
286.	Kabupaten Konawe Selatan	2,5031	Rendah
287.	Kabupaten Lembata	2,5019	Rendah
288.	Kabupaten Wakatobi	2,4951	Rendah
289.	Kabupaten Alor	2,4906	Rendah
290.	Kabupaten Pasangkayu	2,4887	Rendah
291.	Kabupaten Manggarai Barat	2,4887	Rendah
292.	Kabupaten Manggarai Timur	2,4875	Rendah
293.	Kabupaten Muna Barat	2,4872	Rendah
294.	Kabupaten Bireuen	2,4870	Rendah
295.	Kabupaten Buton Selatan	2,4768	Rendah
296.	Kabupaten Tana Toraja	2,4737	Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
297.	Kabupaten Tulang Bawang	2,4715	Rendah
298.	Kabupaten Pelalawan	2,4648	Rendah
299.	Kabupaten Sumba Timur	2,4637	Rendah
300.	Kabupaten Sabu Raijua	2,4593	Rendah
301.	Kabupaten Lampung Utara	2,4592	Rendah
302.	Kabupaten Lahat	2,4502	Rendah
303.	Kabupaten Maluku Tenggara	2,4468	Rendah
304.	Kabupaten Pidie	2,4415	Rendah
305.	Kabupaten Simeulue	2,4392	Rendah
306.	Kabupaten Maluku Barat Daya	2,4387	Rendah
307.	Kabupaten Kotawaringin Timur	2,4369	Rendah
308.	Kabupaten Kerinci	2,4367	Rendah
309.	Kabupaten Aceh Barat	2,4310	Rendah
310.	Kabupaten Nagekeo	2,4301	Rendah
311.	Kabupaten Banggai Laut	2,4289	Rendah
312.	Kabupaten Manggarai	2,4261	Rendah
313.	Kabupaten Aceh Tengah	2,4212	Rendah
314.	Kabupaten Buol	2,4193	Rendah
315.	Kabupaten Malinau	2,4188	Rendah
316.	Kabupaten Jenepono	2,4151	Rendah
317.	Kabupaten Jayapura	2,4058	Rendah
318.	Kabupaten Aceh Tenggara	2,4034	Rendah
319.	Kabupaten Lanny Jaya	2,4017	Rendah
320.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2,3963	Rendah
321.	Kabupaten Dogiyai	2,3942	Rendah
322.	Kabupaten Kepulauan Sangihe	2,3928	Rendah
323.	Kabupaten Aceh Singkil	2,3825	Rendah
324.	Kabupaten Kaur	2,3778	Rendah
325.	Kabupaten Ende	2,3773	Rendah
326.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	2,3673	Rendah
327.	Kabupaten Buru	2,3665	Rendah
328.	Kabupaten Ngada	2,3633	Rendah
329.	Kabupaten Rokan Hilir	2,3513	Rendah
330.	Kabupaten Aceh Timur	2,3513	Rendah
331.	Kabupaten Yahukimo	2,3474	Rendah
332.	Kabupaten Sikka	2,3431	Rendah
333.	Kabupaten Kuantan Singingi	2,3413	Rendah
334.	Kabupaten Lampung Timur	2,3383	Rendah
335.	Kabupaten Aceh Tamiang	2,3355	Rendah
336.	Kabupaten Mappi	2,3332	Rendah
337.	Kabupaten Lebong	2,3323	Rendah
338.	Kabupaten Buton Tengah	2,3320	Rendah
339.	Kabupaten Pesawaran	2,3247	Rendah
340.	Kabupaten Labuhanbatu	2,3095	Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
341.	Kabupaten Merauke	2,3091	Rendah
342.	Kabupaten Donggala	2,3017	Rendah
343.	Kabupaten Kaimana	2,2896	Rendah
344.	Kabupaten Sorong	2,2776	Rendah
345.	Kabupaten Timor Tengah Utara	2,2762	Rendah
346.	Kabupaten Manokwari	2,2745	Rendah
347.	Kabupaten Halmahera Utara	2,2629	Rendah
348.	Kabupaten Halmahera Barat	2,2599	Rendah
349.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	2,2510	Rendah
350.	Kabupaten Biak Numfor	2,2493	Rendah
351.	Kabupaten Rote Ndao	2,2470	Rendah
352.	Kabupaten Kepulauan Meranti	2,2428	Rendah
353.	Kabupaten Puncak	2,2411	Rendah
354.	Kabupaten Seluma	2,2376	Rendah
355.	Kabupaten Aceh Utara	2,2192	Rendah
356.	Kabupaten Aceh Barat Daya	2,2169	Rendah
357.	Kabupaten Nagan Raya	2,2130	Rendah
358.	Kabupaten Indragiri Hulu	2,2110	Rendah
359.	Kabupaten Bener Meriah	2,2097	Rendah
360.	Kabupaten Pulau Morotai	2,2096	Rendah
361.	Kabupaten Musi Rawas Utara	2,2027	Rendah
362.	Kabupaten Waropen	2,2006	Rendah
363.	Kabupaten Aceh Selatan	2,1954	Rendah
364.	Kabupaten Minahasa Selatan	2,1943	Rendah
365.	Kabupaten Padang Lawas Utara	2,1927	Rendah
366.	Kabupaten Buton	2,1869	Rendah
367.	Kabupaten Sarmi	2,1837	Rendah
368.	Kabupaten Jayawijaya	2,1750	Rendah
369.	Kabupaten Kepulauan Talaud	2,1591	Rendah
370.	Kabupaten Seram Bagian Timur	2,1563	Rendah
371.	Kabupaten Sumba Tengah	2,1363	Rendah
372.	Kabupaten Muna	2,1356	Rendah
373.	Kabupaten Flores Timur	2,1348	Rendah
374.	Kabupaten Belu	2,1224	Rendah
375.	Kabupaten Nias Utara	2,1205	Rendah
376.	Kabupaten Minahasa Tenggara	2,1133	Rendah
377.	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,1023	Rendah
378.	Kabupaten Sorong Selatan	2,0766	Rendah
379.	Kabupaten Gayo Lues	2,0753	Rendah
380.	Kabupaten Boven Digoel	2,0572	Rendah
381.	Kabupaten Indragiri Hilir	2,0301	Rendah
382.	Kabupaten Seram Bagian Barat	2,0228	Rendah
383.	Kabupaten Kepulauan Yapen	2,0225	Rendah
384.	Kabupaten Raja Ampat	2,0203	Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
385.	Kabupaten Puncak Jaya	2,0171	Rendah
386.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	2,0046	Rendah
387.	Kabupaten Fakfak	1,9830	Rendah
388.	Kabupaten Nias Selatan	1,9539	Rendah
389.	Kabupaten Sumba Barat Daya	1,9480	Rendah
390.	Kabupaten Tambrau	1,9393	Rendah
391.	Kabupaten Kupang	1,8864	Rendah
392.	Kabupaten Kepulauan Aru	1,8839	Rendah
393.	Kabupaten Teluk Wondama	1,8783	Rendah
394.	Kabupaten Mandailing Natal	1,8748	Rendah
395.	Kabupaten Maybrat	1,8595	Rendah
396.	Kabupaten Keerom	1,8463	Rendah
397.	Kabupaten Asmat	1,8412	Rendah
398.	Kabupaten Nias Barat	1,7629	Sangat Rendah
399.	Kabupaten Melawi	1,7425	Sangat Rendah
400.	Kabupaten Intan Jaya	1,7357	Sangat Rendah
401.	Kabupaten Pegunungan Arfak	1,6951	Sangat Rendah
402.	Kabupaten Pegunungan Bintang	1,6765	Sangat Rendah
403.	Kabupaten Manokwari Selatan	1,5945	Sangat Rendah
404.	Kabupaten Supiori	1,5058	Sangat Rendah
405.	Kabupaten Padang Lawas	1,4177	Sangat Rendah
406.	Kabupaten Kepulauan Sula	1,4052	Sangat Rendah
407.	Kabupaten Paniai	1,3726	Sangat Rendah
408.	Kabupaten Pulau Taliabu	1,3673	Sangat Rendah
409.	Kabupaten Teluk Bintuni	0,9603	Sangat Rendah
410.	Kabupaten Mamberamo Tengah	0,9440	Sangat Rendah
411.	Kabupaten Nabire	0,9110	Sangat Rendah
412.	Kabupaten Yalimo	0,6678	Sangat Rendah
413.	Kabupaten Deiyai	0,6119	Sangat Rendah
414.	Kabupaten Mamberamo Raya	0,3296	Sangat Rendah
415.	Kabupaten Nduga	0,1148	Sangat Rendah

3. SKOR DAN STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 93 (SEMBILAN PULUH TIGA) KOTA

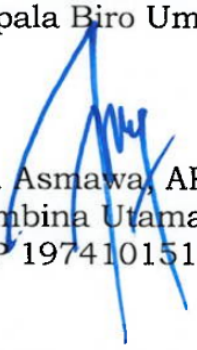
No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
1.	Kota Madiun	3,9920	Tinggi
2.	Kota Tangerang	3,8494	Tinggi
3.	Kota Tangerang Selatan	3,8023	Tinggi
4.	Kota Blitar	3,7797	Tinggi
5.	Kota Bandung	3,7252	Tinggi
6.	Kota Salatiga	3,6635	Tinggi
7.	Kota Denpasar	3,6539	Tinggi

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
8.	Kota Makassar	3,6171	Tinggi
9.	Kota Surabaya	3,5791	Tinggi
10.	Kota Semarang	3,5709	Tinggi
11.	Kota Kediri	3,5662	Tinggi
12.	Kota Batam	3,5618	Tinggi
13.	Kota Depok	3,5301	Tinggi
14.	Kota Pasuruan	3,5293	Tinggi
15.	Kota Probolinggo	3,5286	Tinggi
16.	Kota Tasikmalaya	3,5233	Tinggi
17.	Kota Palembang	3,5035	Tinggi
18.	Kota Batu	3,4855	Tinggi
19.	Kota Pontianak	3,4808	Tinggi
20.	Kota Surakarta	3,4797	Tinggi
21.	Kota Cimahi	3,4579	Tinggi
22.	Kota Banjar	3,4570	Tinggi
23.	Kota Pangkalpinang	3,4355	Tinggi
24.	Kota Yogyakarta	3,4290	Tinggi
25.	Kota Mojokerto	3,4240	Tinggi
26.	Kota Banjarbaru	3,4235	Tinggi
27.	Kota Serang	3,4201	Tinggi
28.	Kota Balikpapan	3,4112	Tinggi
29.	Kota Padang	3,4004	Sedang
30.	Kota Payakumbuh	3,3939	Sedang
31.	Kota Palangka Raya	3,3855	Sedang
32.	Kota Malang	3,3799	Sedang
33.	Kota Tidore Kepulauan	3,3769	Sedang
34.	Kota Bontang	3,3738	Sedang
35.	Kota Sukabumi	3,3347	Sedang
36.	Kota Palopo	3,3343	Sedang
37.	Kota Bogor	3,3243	Sedang
38.	Kota Samarinda	3,3053	Sedang
39.	Kota Metro	3,2822	Sedang
40.	Kota Palu	3,2817	Sedang
41.	Kota Pekalongan	3,2690	Sedang
42.	Kota Bekasi	3,2669	Sedang
43.	Kota Mataram	3,2624	Sedang
44.	Kota Magelang	3,2557	Sedang
45.	Kota Cirebon	3,2498	Sedang
46.	Kota Pekanbaru	3,2351	Sedang
47.	Kota Banjarmasin	3,2090	Sedang

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
48.	Kota Medan	3,2039	Sedang
49.	Kota Tanjung Pinang	3,2028	Sedang
50.	Kota Bitung	3,1788	Sedang
51.	Kota Tegal	3,1336	Sedang
52.	Kota Prabumulih	3,1064	Sedang
53.	Kota Manado	3,0807	Sedang
54.	Kota Singkawang	3,0616	Sedang
55.	Kota Lubuklinggau	3,0598	Sedang
56.	Kota Padang Panjang	3,0347	Sedang
57.	Kota Kupang	3,0275	Sedang
58.	Kota Tarakan	2,9968	Sedang
59.	Kota Pematangsiantar	2,9829	Sedang
60.	Kota Jambi	2,9212	Sedang
61.	Kota Gorontalo	2,9135	Sedang
62.	Kota Pagar Alam	2,9113	Sedang
63.	Kota Bima	2,9079	Sedang
64.	Kota Cilegon	2,8991	Sedang
65.	Kota Dumai	2,8977	Sedang
66.	Kota Parepare	2,8925	Sedang
67.	Kota Tebing Tinggi	2,8912	Sedang
68.	Kota Tomohon	2,8675	Sedang
69.	Kota Kotamobagu	2,8426	Sedang
70.	Kota Bukittinggi	2,8071	Sedang
71.	Kota Kendari	2,8045	Sedang
72.	Kota Pariaman	2,8038	Sedang
73.	Kota Ternate	2,7731	Sedang
74.	Kota Solok	2,7592	Sedang
75.	Kota Banda Aceh	2,6993	Sedang
76.	Kota Langsa	2,6928	Sedang
77.	Kota Lhokseumawe	2,6679	Sedang
78.	Kota Jayapura	2,6186	Sedang
79.	Kota Binjai	2,5858	Rendah
80.	Kota Bandar Lampung	2,5786	Rendah
81.	Kota Ambon	2,5382	Rendah
82.	Kota Padangsidimpuan	2,5324	Rendah
83.	Kota Baubau	2,5170	Rendah
84.	Kota Sungai Penuh	2,5156	Rendah
85.	Kota Tanjungbalai	2,4936	Rendah
86.	Kota Sibolga	2,4295	Rendah
87.	Kota Sabang	2,3552	Rendah

No	Nama Pemerintah Daerah	Skor	Status
88.	Kota Bengkulu	2,3435	Rendah
89.	Kota Sorong	2,3090	Rendah
90.	Kota Gunungsitoli	2,3045	Rendah
91.	Kota Subulussalam	2,3010	Rendah
92.	Kota Tual	2,2850	Rendah
93.	Kota Sawahlunto	2,2817	Rendah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


Dr. Asmawa, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410151993111003

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN